

ABSTRAK

PENERAPAN TINDAK PIDANA ADMINISTRASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN DERMAROLLER PADA KLINIK KECANTIKAN

Masya Intan Riani (2210622062), Handoyo Prasetyo, Beniharmoni Harefa

Penelitian ini mengkaji penerapan tindak pidana administrasi terhadap penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dermaroller pada klinik kecantikan, serta penegakan hukumnya berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 219/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Sel juncto Nomor 176/Pid.Sus/2025/PT.DKI. Permasalahan yang diangkat berfokus pada bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan pada praktik klinik kecantikan yang tidak memenuhi standar dan perizinan kesehatan serta bagaimana pengaturan dan penerapan sanksi administrasi yang berimplikasi pidana dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaku penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dermaroller pada klinik kecantikan dalam studi kasus Ria Beauty, pelaku terbukti secara sengaja mengedarkan dan menggunakan sediaan farmasi serta alat kesehatan dermaroller tanpa izin edar dan tanpa kompetensi medis, sehingga memenuhi unsur tindak pidana kesehatan; (2) penyelenggaraan klinik kecantikan merupakan bagian dari rezim hukum administrasi kesehatan yang mensyaratkan pemenuhan perizinan berusaha berbasis risiko dan syarat administratif meliputi standar sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan. Penerapan Tindak Pidana Administrasi (*Administrative Penal Law*) adanya pelanggaran dalam persyaratan administrasi pada Undang-undang No.17 Tahun 2023 yang berisikan sanksi administrasi dengan menekankan pengawasan pemerintah sebagai pemangku kebijakan terhadap pelaku penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa izin edar pada klinik kecantikan. Serta dijatuhinya sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) guna memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Kata kunci: tindak pidana administrasi, klinik kecantikan, sediaan farmasi, alat kesehatan dermaroller, hukum kesehatan.

ABSTRACT

THE ENFORCEMENT OF ADMINISTRATIVE PENAL LAW FOR THE UNAUTHORIZED USE OF PHARMACEUTICAL PREPARATIONS AND DERMAROLLER MEDICAL DEVICES IN BEAUTY CLINICS

Masya Intan Riani, Handoyo Prasetyo, Beniharmoni Harefa

This study examines the application of administrative criminal offenses in cases involving the misuse of pharmaceutical preparations and dermaroller medical devices in beauty clinics, as well as the enforcement of relevant legal provisions based on a case study of Court Decision Number 219/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Sel juncto Decision Number 176/Pid.Sus/2025/PT.DKI. The research focuses on the issue of criminal liability for perpetrators who misuse pharmaceutical preparations and medical devices in beauty clinic practices that fail to comply with health standards and licensing requirements, as well as on the regulation and application of administrative sanctions that carry criminal implications in order to protect public health. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of the study indicate that: (1) in the case of Ria Beauty Clinic, the perpetrator was proven to have intentionally distributed and used pharmaceutical preparations and dermaroller medical devices without marketing authorization and without possessing the requisite medical competence, thereby fulfilling the elements of a health-related criminal offense; and (2) the operation of beauty clinics falls within the health administrative law regime, which requires compliance with risk-based business licensing and administrative requirements, including standards related to health human resources, pharmaceutical preparations, and medical devices. The implementation of Administrative Penal Law for violations of the administrative requirements of law Number 17 Of 2023, which contains administrative sanctions, emphasizes government oversight as a policymaker for perpetrators of misuse of pharmaceutical preparations and medical devices without marketing authorization in beauty clinics. Criminal sanctions are also imposed as a last resort (Ultimum Remidum) to provide optimal legal protection for public safety and health.

Keywords: *administrative criminal offenses, beauty clinics, pharmaceutical preparations, dermaroller medical devices, health law.*